



REPRESENTASI WANITA DALAM POLITIK DI INDONESIA; PENDEKATAN KONSTRUKSIONISME KRITIS

Supadiyanto

Akademi Komunikasi Indonesia (AKINDO), Jl. Laksda Adisucipto No. 279 Yogyakarta,
padiyanto@yahoo.com

Abstract

The representation of women community in political domain in Indonesia is quite low. The variety of erection policies in Indonesia is not fully to accommodate the women's need. The executive, judicative, and legislative functionaries are still accommodated by men community. Thus, the thoughts which are possessed by regulation makers and erection policy conductors definitely will make the gender refraction. This qualitative-descriptive research analyzed the representation of women community on political in Indonesia. This research used critical constructivism approach. This research was conducted on August 10th up to December 31st, 2015. The results of this research are; (1) elite community dominated non-elite community in variety of dominance levels. It made the marginalization of non-elite community included women community. The domination of men community on public domains should be worked in a equilibrate way or should be proposed the proportionality. (2) The political awareness of women community promotes the political level. On the contrary, the political awareness of men community itself which descends the tension of political fanaticism to the women community is as social dialectic and communication of humanistic politics which must be built by all of elements of this nation.

Keywords

*women, politics,
constructivism.*

Abstrak

Representasi kaum wanita dalam panggung politik di Indonesia masih cukup rendah. Berbagai kebijakan pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan kaum wanita. Para pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif masih didominasi kaum pria, sehingga cara pandang yang dimiliki para pembuat regulasi dan pelaksana kebijakan pembangunan itu tentu akan bias gender. Penelitian kualitatif-diskriptif ini menganalisis representasi wanita pada perpolitikan di Indonesia, menggunakan pendekatan konstruksionisme kritis. Penelitian ini dilakukan 10 Agustus hingga 31 Desember 2014. Hasilnya, dominasi kaum elite atas non elite dalam berbagai jenjang kekuasaan, berakibat atas termarginalisasinya kaum non-elit, termasuk kaum wanita. Dalam pada itu, dominasi kaum pria pada berbagai domain publik seharusnya diupayakan berimbang (ekuilibrium) atau mengedepankan proporsionalitas. Kesadaran politik kaum wanita me-



naikkan derajat politik, atau sebaliknya kesadaran politik kaum pria sendiri untuk menurunkan tensi fanatisme politiknya di mata kaum wanita, menjadi dialektika sosial dan komunikasi politik humanistik yang harusnya dibangun oleh seluruh elemen bangsa ini.

A. PENDAHULUAN

Posisi kaum wanita Indonesia selalu berada pada posisi lemah, tidak terkecuali eksistensi mereka pada wilayah publik. Buktinya, dominasi kaum pria atas wanita dalam perpolitikan nasional hingga kini masih menjadi sesuatu yang lazim. Hasil penelitian tim ITB-Unpad terkait penyusunan Renstra DPR RI 2010-2015 berikut data Sekretariat DPR RI, menunjukkan bahwa jumlah anggota DPR RI berjenis kelamin wanita masih sangat minim. Susunan DPR RI 2009-2014 menunjukkan hanya terdapat 99 anggota legislatif wanita (17,66 %), sementara anggota DPR RI laki-laki sebanyak 461 orang atau 82,34 %. Untuk DPR RI 2014-2019, hanya terdapat 97 anggota legislatif wanita (17,32 %) dan 463 anggota DPR RI laki-laki (82,68 %). Namun yang lebih memprihatinkan, jumlah anggota legislatif wanita pada tahun-tahun sebelumnya bahkan jauh lebih rendah. Pada struktur DPR RI 2004-2009, tercatat hanya ada 63 anggota legislatif wanita (11,5 %), sedangkan 487 anggota DPR RI pria (88,5 %). Sementara pada kepengurusan DPR RI tahun 1999-2004, angka keterwakilan wanita di Gedung DPR RI hanya sebanyak 460 orang (8,4 %), sedangkan 500 orang lainnya adalah lelaki (91,6 %). Pada susunan DPR RI 1997-1999, hanya ada 54 anggota DPR RI wanita (9,7 %), sementara 500 orang lainnya adalah pria (90,3 %).

Bila dilihat lebih jauh ke belakang, sejak Pemilu pertama Orde Lama (1955) hanya menghasilkan 17 anggota DPR RI wanita (5,9 %). 236 orang lainnya adalah laki-laki (96,3 %). Pada Pemilu kedua di masa Orde Baru (1971-1977) hanya ada 36 wanita yang duduk menjadi

anggota DPR RI (7,3 %). Sisanya 460 orang adalah pria (92,7 %). Pada susunan DPR RI 1977-1982 pun jumlah anggota DPR RI wanita hanya ada 29 orang saja (5,9 %), sementara laki-laki 460 orang (94,1 %). Pada struktur DPR RI 1982-1987, tercatat 460 anggota DPR RI pria (92,2 %) dan 39 orang wanita (7,8 %). Pada formasi DPR RI 1987-1992, ada 65 DPR RI wanita (11,5 %) dan 500 DPR RI berjenis kelamin pria (88,5 %). Pada formasi DPR RI 1992-1997, ada 62 DPR RI wanita (11 %) dan 500 DPR RI laki-laki (89 %).

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa kaum wanita belum mendapat hak politik proporsional dalam perpolitikan nasional di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga saat ini. Ironisnya, realitas politik serupa juga terjadi pada peta politik di tingkat daerah (propinsi maupun kabupaten/kotamadya). Data KPU Pusat 2013, jumlah bakal calon anggota legislatif 2014 yang diterima KPU Pusat sebanyak 6.576 orang. Terdiri atas 2.434 wanita (37 %) dan 4.142 pria (63 %). Artinya, dominasi politisi pria masih sangat menonjol. Dari sana dapat dipastikan peluang politisi pria menduduki jabatan DPR RI jauh lebih besar ketimbang para politisi wanita. Di tingkat daerah, seperti di Propinsi Jawa Tengah tercatat jumlah Caleg DPRD Jateng Pemilu 2014 terdiri atas 658 Caleg pria (65,2 %) dan hanya ada 351 Caleg wanita (34,8 %).

Idealnya, keterwakilan kalangan wanita menjadi politisi menjadi kebutuhan yang harus terealisasi. Ada satu rumusan masalah utama yang dimunculkan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana hasil analisis kasus representasi wanita dalam perpolitikan di Indonesia, dengan pendekatan konstruksionisme kritis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif-diskriptif. Segala sumber data penelitian berasal dari kajian pustaka. Adapun teori utama (besar) yang di-

jadikan bahan analisis terhadap persoalan yang diangkat menggunakan teori konstruksionisme kritis yang merupakan kombinasi dari teori konflik dan interaksionisme simbolik. Sedangkan untuk mendapatkan keakuratan data, peneliti melakukan kajian terhadap berbagai data literatur termasuk hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Setelah data diperoleh, peneliti melakukan analisis sehingga diperoleh kesimpulan yang bisa menjawab secara taktis, dan komprehensif terkait persoalan utama yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini berlangsung sejak 10 Agustus-5 September 2014.

C. PEMBAHASAN

1. Wanita dalam Perpolitikan Indonesia; Teori Konflik

Sebagaimana berbagai data kuantitatif di atas, dengan merujuk pada teori konflik, jelas ada ketidaksamarataan, kesenjangan politik dan sosial antara kaum wanita dan kaum pria dalam mengakses jabatan legislatif. Implikasinya, pusat-pusat kekuasaan negara selama ini hanya didominasi dan dikendalikan oleh mayoritas kaum pria. Jika dianalisis, ada banyak dalih logis yang bisa diajukan mengapa keterwakilan wanita dalam panggung politik di Indonesia masih cukup rendah. Menurut Heriyani Agustina (2009: 166), ada 6 faktor pemicu utama, meliputi nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan laki-laki, pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional, citra wanita sebagai kaum yang lemah lembut, ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial, kurangnya *political-will* pemerintah dan kekurangan dalam kualitas individu wanita dan kaderisasi politik.

Menurut Supadiyanto (Politik dan Diskriminasi Gender, 2013), faktor utama yang menyebabkan politisi wanita masih cukup minim di Indonesia akibat pemasangan hak-hak politik wanita untuk tampil di wilayah publik, termasuk

dalam dunia politik yang penuh dengan pergulatan fisik, intelektual dan psikologis hanya akan melahirkan budaya patriarki yang otoriter dan menindas. Terlebih bagi sistem kenegaraan Indonesia yang mayoritas jumlah penduduknya lebih banyak kaum wanita. Pemberdayaan kaum wanita dan agar wanita aktif dan masuk dalam dunia politik adalah langkah yang layak dikembangkan dalam pembangunan nasional. Karena itu, wanita modern Indonesia akan memiliki banyak talenta: (1) lihai mengelola kehidupan rumah tangga, khususnya dalam mendidik anak-anak dan bermitra dengan suami; (2) memiliki aktivitas kerja di luar rumah yang memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Hal itu bukan berarti mengeksploitasi dan menuntut wanita untuk bekerja penuh (24 jam) pada wilayah domestik, namun dengan membuka kran keadilan dalam berpolitik tersebut, memberi kesempatan yang sama kepada kaum wanita dan pria untuk saling memahami hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam analisisnya (Mendidik Politik Kaum Hawa, 2013), Supadiyanto menyatakan bahwa masalah dominasi kekuasaan pria atas wanita dalam dunia politik masih terjadi hingga sekarang. Pasalnya, karir politisi pria lebih menonjol ketimbang dengan politisi wanita. Di negara-negara maju, politisi wanita masih menjadi kelompok minoritas yang menduduki kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Di negara-negara liberal maupun komunis, politisi wanita juga masih minim. Apalagi di negara-negara muslim, jarang dijumpai ada wanita yang termotivasi kuat menjadi politisi. Sebab mereka terbentur aturan teologis yang melarang para wanita tampil menjadi pemimpin (politisi). Minimnya politisi wanita yang terjun dalam politik praktis, berkompetisi secara sepadan, adil, dan demokratis dengan politisi pria menjadikan berbagai kebijakan pembangunan berbangsa-bernegara tidak pro kepentingan

wanita. Sebab mereka yang memutuskan berbagai kebijakan tersebut didominasi kelompok pria.

Di samping isu dominasi pria dalam dunia politik, kekuasaan legislatif di Indonesia saat ini juga didominasi oleh politik dinasti klan atau keluarga. Paling tidak ada enam partai politik (Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, PAN, PBB dan PPP) yang dalam Pemilu Legislatif 2014 memasukkan nama yang punya hubungan keluarga dengan elite politik (Tempo, 7 Mei 2013). Mereka adalah Edhie Baskoro, Hartanto Edhie Baskoro (adik ipar SBY), Agus Hermanto (adik ipar SBY), Lintang Pramesti (anak Agus Hermanto), Putri Permatasari (kemenakan Agus Hermanto), Sartono Hutomo (sepupu SBY), Dwi Astuti Wulandari (anak Hadi Utomo), Nurcahyo Anggoroajati (anak Hadi Utomo), Decky Hardijanto (kemenakan Hadi Utomo), Indri Sulistiyowati (kemenakan Hadi Utomo), Sumandany Zirnata (suami Indri Sulistiyowati) dan Mexicana Leo Hananto Wibowo (kemenakan SBY) berasal dari Partai Demokrat. Dari PAN muncul nama Hanna Gayatri (kakak Hatta Rajasa), Ahmad Hafidz Tohir (adik Hatta Rajasa) dan Ahmad Hanafi Rais (anak Amien Rais). Dari Golkar: Taufan Eko Nugroho (menantu Aburizal Bakrie), Dave Laksono (anak Agung Laksono), Jerry Sambuaga (anak Theo Sambuaga) dan Hikmat Tomet (suami Atut Chosiyah, Gubernur Banten). Pada PDI Perjuangan terdapat Puan Maharani, Guruh Soekarno Putra (adik Megawati), Nazaruddin Kiemas (adik ipar Taufik Kiemas), Puti Guntur Soekarno (kemenakan Megawati). PBB memasukkan Yustiman Ihza (adik Yusril) dan Tri Natlie Read (menantu Yusril) sebagai caleg. PPP memasukkan Wardatul Asriah (istri Suryadharma Ali), Kartika Yudhisti (anak Suryadharma Ali) dan Rendhika D. Harsono (suami Kartika Yudhisti). Meskipun pada akhirnya, beberapa Caleg nepotisme tersebut gagal menjadi anggota DPR RI 2014.

Solusi yang ditawarkan teori konflik atas kesenjangan di atas adalah: Pertama, sepanjang Orde Reformasi negara telah memberi kesempatan bagi kaum wanita untuk berkarir menjadi politisi. Ditetapkannya angka minimal 30 persen bagi politisi wanita dalam Daftar Caleg DPR/ DPRD yang diusulkan setiap partai politik sebagaimana amanah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan representasi atas keberpihakan politik yang pro wanita. Tapi secara proporsional kuota bagi politisi wanita di atas terbilang minim ketimbang politisi pria. Minimnya wanita yang terjun dalam bidang politik, sesungguhnya adalah trauma sejarah dunia. Sepanjang sejarah peradaban dunia, wanita dianggap sebagai bukan pencipta sejarah. Sejarah adalah reproduksi kebenaran publik yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan. Syarat utama yang harus dimiliki oleh calon penguasa harus memiliki dukungan massa dalam jumlah besar, kaya, menguasai jaringan media massa dan terhubung dengan kekuatan di luar negeri, mampu menghegemoni segenap kekuatan partai politik dan kekuatan militer (Supadiyanto, Parpol, Kekuasaan dan Konflik Kepentingan Bernegara, 2013).

Kedua, untuk melipatgandakan jumlah politisi wanita yang menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD; maka yang harus dilakukan yaitu melakukan pendidikan politik bagi kaum wanita. Memberikan kesempatan yang lebar kepada kaum Hawa untuk menempuh pendidikan tinggi dan meraih karir dalam berbagai bidang kehidupan; termasuk dalam dunia politik menjadi agenda prioritas pertama. Jika hal tersebut tidak dilakukan, kendati misalnya Undang-Undang tentang Pemilu mewajibkan bagi setiap partai politik untuk memasukkan 50 persen politisi wanita untuk dicalonkan menjadi anggota DPR RI maupun DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, nampaknya sulit direalisasikan. Karena memang

sukar untuk menemukan politisi wanita yang bermutu, kecuali sekadar pasang badan, yang penting berjenis kelamin wanita. Kalau hal terakhir tadi terjadi, jelas politisi wanita pasti kalah bersaing dengan politisi pria. Kesadaran politik kaum wanita harus dimunculkan mulai dari sekarang. Kaum wanita tidak hanya dituntut menjadi pemilih dalam hajatan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, Pemilu Legislatif maupun Pilkada. Mereka harus didorong menjadi tokoh-tokoh yang dipilih. Politik adalah kunci untuk mengangkat fungsi dan peran wanita tidak sekadar mengurus wilayah domestik, namun harus diprovokasi menguasai panggung politik atau wilayah publik. Karena politik adalah mahkotanya ilmu pengetahuan. Jika ilmu eksakta merupakan pondasi (basis) dari ilmu pengetahuan, ilmu sosial adalah pengoperasionalisasi ilmu pengetahuan. Dalam pada itu, seluruh ilmu pengetahuan dikendalikan oleh politik. Logikanya, penguasa bisa apa saja mengatur kemaslahatan bangsa menurut kehendak dan kesepakatan para penguasa (Supadiyanto, *Pesona Kekuasaan*, 2013).

Ketiga, media massa cetak maupun elektronik sebagai institusi ekonomi dan politik, harus memberi kesempatan berimbang kepada para politisi wanita untuk tampil menyampaikan gagasannya kepada publik. Media massa seharusnya tidak dimonopoli oleh para narasumber atau politisi pria, karena media massa memiliki kekuatan untuk mengatur bagaimana orang berpikir tentang apa yang penting dan dampaknya pada penguatan realitas.

Keempat, keterwakilan wanita di parlemen yang timpang sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan kodrat dan takdir (seks), namun lebih pada perbedaan konstruksi sosial (gender). Keterwakilan wanita di parlemen juga jangan dilihat dari segi kuantitas yang tercermin dari banyaknya wanita yang menjadi anggota legislatif tapi harus juga disertai dengan peningkatan kualitas yang memadai. Semua anggota par-

lemen baik laki-laki maupun wanita harus memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender di semua bidang kehidupan. Karena merekalah yang melahirkan berbagai produk perundang-undangan bagi kemaslahatan hidup banyak orang (Agustina, 2009: 169).

2. Teori Interaksionisme Simbolik

Teori interaksionisme simbolik yang fokus pada interaksi manusia sehari-hari dan memperhatikan bagaimana cara-cara orang berpikir serta memberikan makna (menginterpretasi) pada segala hal di dunia berdasarkan pengalaman sebelumnya. Minimnya jumlah anggota legislatif wanita di Indonesia jelas diakibatkan oleh faktor sejarah yang mengkonstruksi. Di mana oleh publik, dunia politik praktis distigmatisasikan identik dengan cara-cara yang kotor, kejahatan, konspirasi dan skandal. Stigmatisasi negatif tersebut hingga kini masih melekat dalam benak publik, apalagi bagi kaum wanita. Karena itu, ketika sebagian besar wanita ditanya kenapa tidak bercita-cita menjadi politisi, mereka akan menjawab bahwa mereka tidak tertarik dengan dunia yang kejam.

Akibat kesalahpahaman publik mempersepsikan dunia politik semacam itu, kemudian berimplikasi negatif pada interpretasi dan persepsi publik, khususnya kaum wanita. Mereka menilai bahwa politik praktis hanya tepat untuk kaum pria, karena identik dengan persaingan yang keras dan kejam. Padahal sejatinya politik adalah kebutuhan manusia untuk menciptakan rasa aman, hidup sejahtera dan berkualitas. Berkat politik, akan terlahir para pemimpin dunia, pemimpin nasional, pemimpin regional hingga pemimpin lokal yang memiliki kekuatan penuh dalam menentukan berbagai kebijakan berbangsa dan bernegara. Harapan akan lahirnya banyak politisi wanita handal di Indonesia masih cukup berat hingga saat ini (Supadiyanto, *Birokrat dan Kesejahteraan Rakyat*, 2013).

Meskipun kaum wanita memiliki kesempatan untuk berkompetisi dengan kaum pria dalam panggung politik, mereka lebih memilih untuk tidak menggunakannya. Artinya, bisa dimaknai bahwa kaum wanita secara tidak sadar telah menindas dirinya sendiri. Patut diperhatikan juga bahwa budaya patriarki di Indonesia masih sangat kuat. Keputusan seorang istri untuk terjun menjadi politisi wanita masih sangat bergantung pada keputusan sang suami. Atau bagi mereka yang belum menikah, keputusan untuk terjun dalam bidang politik harus mendapatkan restu terlebih dahulu dari seorang ayah, karena keuangan keluarga dikendalikan oleh sang suami atau sang ayah. Dalam konteks itu, posisi kaum wanita tersandera oleh keputusan kaum lelaki. Apalagi ongkos politik yang dibutuhkan untuk bisa sukses menjadi anggota legislatif sangat tinggi.

Disertasi berjudul: “Komunikasi politik dan Pemaknaan Anggota Legislatif terhadap Konstituen (Studi Interpretatif Pemilu 2009) yang ditulis oleh politisi PDI Perjuangan Pramono Anung Wibawa, menemukan fakta menarik bahwa rata-rata biaya kampanye politik yang dibutuhkan para Caleg DPR RI dalam Pemilu 2009 antara Rp 300 juta hingga Rp 6 miliar. Caleg berlatar belakang artis dan publik figur terbilang paling rendah, karena hanya menghabiskan Rp 300 juta sampai dengan Rp 600 juta. Sementara para aktivis dan pengurus partai politik yang menjadi Caleg menghabiskan biaya kampanye sebesar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Caleg DPR RI yang berasal dari pensiunan TNI/Polri membutuhkan biaya kampanye senilai Rp 800 juta hingga Rp 1,8 miliar. Sedangkan para pengusaha yang ingin menjadi Caleg DPR RI menghabiskan Rp 1,8 miliar sampai dengan Rp 6 miliar hanya untuk biaya kampanye politik.

Pendapatan anggota DPR RI periode 2009-2014 adalah sekitar Rp 1,1 miliar per tahun, dengan rincian: gaji bulanan Rp 40 juta, uang

aspirasi Rp 420 juta per tahun dan Rp 212 juta uang lelah pembahasan undang-undang dan alat kelengkapan DPR RI lainnya (Suara Merdeka edisi 18 Maret 2013). Gaji anggota DPR RI selama 5 tahun menjabat adalah sekitar Rp 5,5 miliar, di mana untuk biaya kampanye saja menghabiskan Rp 6 miliar. Artinya, ongkos kampanye politik jauh lebih besar ketimbang pendapatan yang diperoleh selama menjadi anggota dewan. Tentu hal itu berkorelasi positif dengan praktik KKN di Indonesia. Di mana banyak anggota legislatif yang tersangkut kasus KKN. Stigmatisasi tersebut memperburuk citra dunia politik praktis di Indonesia. Interpretasi dan persepsi publik, khususnya kaum wanita pada dunia politik juga semakin buruk, sehingga animo kaum wanita terjun dalam bidang politik cukup rendah.

Solusi yang ditawarkan melalui pendekatan interaksionisme simbolik ini adalah dengan mengubah cara pandang masyarakat bahwa politik itu seharusnya dijadikan kebutuhan vital untuk memajukan pembangunan nasional. Mahalnya ongkos politik untuk menjadi anggota legislatif bisa disiasati dengan menetapkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik dengan membangun pola komunikasi politik yang efektif dan efisien. Di samping itu, peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan mewajibkan setiap penduduk mengenyam pendidikan di bangku perguruan tinggi juga harus diadvokasi.

3. Teori Konstruksionisme Kritis

Teori konstruksionisme kritis memberi tekanan pada kepentingan elit dalam proses merekonstruksi masalah. Konstruksionisme kritis memperdebatkan bagaimana masalah-masalah sosial dikonstruksi, dipertimbangkan dan disajikan pada publik yang seringkali mencerminkan kepentingan-kepentingan elit daripada kepentingan publik, yang seringkali mengorbankan orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Konstruksionisme kritis memberi kesempatan yang sama kepada kelompok-

kelompok yang tak memiliki kekuasaan dalam masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat mereka, melalui debat publik, dengan menggunakan sumber daya kelompok-kelompok tersebut dalam melawan pihak elit atau kelompok yang berkuasa (Heiner, 2006: 9-11).

Menurut Robert Heiner (2006: 7), teori konstruksionisme kritis merupakan hasil sintesis dua teori yang sangat berpengaruh dalam sosiologi, yaitu teori konflik dan interaksionisme simbolik. Teori konflik menekankan struktur sosial dan ketidakadilan atau ketimpangan yang terjadi dalam hubungan individu, kelompok dan institusional, dengan menawarkan konsep keadilan sosial, liberalisme dan humanitarisme untuk mengatasi terjadinya ketidaksamaan atau ketidakadilan itu. Teori konflik berasal dari pemikiran Karl Marx yang menitikberatkan pada konflik kelas antara kaum borjuis dan proletar di masa terjadinya Revolusi Industri. Atau dalam konteks modern, antara kaum pengusaha atau penguasa elit dan buruh, antara orang kaya dan orang miskin, antara orang berkulit putih dan orang berkulit hitam, antara laki-laki dan wanita dan lain sebagainya, yang memicu terjadinya konflik kelas.

Dalam konteks yang sama, teori konflik memberi perhatian besar pada ketidaksamaan atau ketidakadilan kekuasaan (*inequality of power*), di mana kekuasaan sangat dominan dalam mempengaruhi terbentuknya struktur sosial. Pada tahap selanjutnya, struktur sosial kuasa mempengaruhi bagaimana cara orang-orang berpikir. Teori konflik modern kritis pada segala aspek yang berhubungan dengan kapitalisme, dengan memandang bahwa kekuasaan negara yang paling nyata dikendalikan oleh para kapitalis, atau lebih tepatnya para pemilik atau pemimpin perusahaan nasional dan multinasional (Heiner, 2006: 8-9).

Interaksionisme simbolik fokus pada interaksi manusia sehari-hari dan memperhatikan bagaimana cara mereka berpikir dan memberi

makna pada segala hal di dunia ini. George Herbert Mead berpendapat bahwa manusia berbeda dengan hewan, karena manusia memiliki kemampuan berkomunikasi yang didasarkan pada bahasa. Di mana bahasa tersusun atas kata-kata. Kata-kata sendiri adalah simbol. Setiap manusia tidak secara langsung merespons lingkungan, namun mereka merespons pada interpretasi mereka terhadap lingkungan. Padahal kita tahu, semua interpretasi atas realitas berdasarkan pada pengalaman hidup masing-masing orang. Sehingga adanya pengalaman sejarah masing-masing orang yang berbeda-beda, akan berpengaruh pada daya interpretasi dan skala prioritas masalah sosial yang berbeda juga (Heiner, 2006: 7-8).

Menurut Blumer, interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga premis, yaitu: manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu bagi mereka, manusia tersebut berasal dari "interaksi sosial seseorang dengan orang lain," dan makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung (Sukidin, 2002: 131). Teori konstruksionisme kritis dapat dibedakan dengan teori konstruksionisme sosial, karena konstruksionisme sosial menekankan bagaimana makna-makna pada masalah sosial dikonstruksi. Konstruksi masalah meliputi sejumlah proses, yaitu: mengidentifikasi sebuah gejala sebagai masalah, menjelaskan penyebab terjadinya gejala tersebut dan mempersuasi publik bahwa gejala tersebut berpotensi menjadi masalah besar dan harus segera dicarikan solusinya (Heiner, 2006: 9-10).

4. Interaksionisme Simbolik dan Konflik

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat tiga titik temu antara teori konflik dan konstruksionisme simbolik dalam konstruksionisme kritis ini. Pertama, terjadi pada hubungan interaksional antara manusia dalam skala kecil, komunitas maupun institusional. Interaksi simbolik fokus

pada hakikat interaksi, pada pola-pola dinamis dari tindakan sosial dan hubungan sosial. Karena pada dasarnya, interaksi sosial adalah interaksi simbol. Manusia berinteraksi dengan yang lain dengan cara menyampaikan simbol, sementara yang lain memberi makna atas simbol atau menginterpretasikannya (Junaidi, 2010: 20-21). Dalam hasil itu, sesungguhnya terjadi dialektika antara teori konflik dan interaksionisme simbolik. Manakala simbol yang dikirim atau dikomunikasikan oleh komunikator diterima oleh pihak lain dan diinterpretasikan dengan frekuensi makna yang sama dan selaras, maka komunikasi akan berjalan lancar. Namun ketika terdapat perbedaan daya interpretasi antara dua orang atau lebih, makna yang dihasilkan juga akan berbeda-beda sehingga memicu terjadinya konflik antar kelas.

Kedua, terjadi pada derajat pengaruh kekuasaan yang dipegang oleh elit, di mana elit di sini bisa diterjemahkan sebagai pengusaha kaya, penguasa, pintar, pria, kulit putih, fisik normal dan superior. Sedangkan non elit adalah mereka para pekerja buruh, rakyat, miskin, bodoh, wanita, fisik cacat dan inferior. Teori konflik menuntut agar kelas non elit di atas diberi ruang yang sama atau kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi dan mengaktualisasikan diri. Khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan menuntut adanya keadilan sosial, keadilan politik, keadilan ekonomi, liberalisme dan humanitarisme (Heiner, 2006: 8). Interaksionisme simbolik jelas menempatkan para elit dengan segala fasilitas keunggulannya sebagai pencipta makna atau simbol. Mereka menguasai segala aspek kehidupan, sehingga mampu mengontrol pihak lain dengan strategi hegemoni dan dominasi. Dalam konteks itu, teori konflik dan interaksionisme simbolik akan saling berhadap-hadapan dan diberi apresiasinya melalui teori konstruksionisme kritis.

Ketiga, terjadi pada politisasi simbol atau bahasa itu sendiri. Politisasi simbol atau bahasa menjadi kata kunci bagi pemikiran interaksionisme simbolik dalam menginterpretasikan makna atas dasar pengalaman hidup sebelumnya atau atas dasar proses pembelajaran. Hal ini relevan dengan pemikiran Stephanus Djawanai (2009: 16) serta Ritzer & Goodman (2004), bahwa manusia adalah organisme yang hidup dalam lingkungan sosial budaya, menciptakan sistem nilai dan mengembangkan daya untuk belajar serta mengajari dirinya sendiri dan keturunannya untuk beradaptasi dan bertahan hidup melalui bahasa. Tujuan akhir interaksionisme simbolik adalah memahami proses interpretasi atas makna, simbol dan bahasa untuk menciptakan komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi massa dan komunikasi organisasi secara sistematis. Politisasi simbol atau bahasa juga menjadi kata kunci bagi teori konflik untuk menjelaskan adanya ketidakadilan atau ketidakadilan sosial-politik-ekonomi dalam kehidupan di dunia ini. Dengan tujuan terciptanya keadilan atau kesamaan sosial dan politik melalui pemerjuangan kelas-kelas yang tertindas dan tersingkirkan. Alat-alat produksi dan alat-alat komunikasi (*the means of productions and communications*) menjadi urgensi digunakan sebagai politisasi simbol dan bahasa. Simbol dan bahasa akhirnya menjadi penting dan strategis dalam pemikiran teori kritis dan interaksionisme simbolik, karena di dalam simbol atau bahasa sebuah makna kemudian muncul.

Menurut Jean Piaget (1955), fungsi awal bahasa manusia adalah simbolisasi, bukan komunikasi (Casti, 1989: 241). Stephanus Djawanai (2009: 2) berpendapat bahwa bahasa digunakan sebagai alat representasi yang memungkinkan manusia menjelaskan kehidupan secara renik, jelas dan tepat. Bahasa manusia diwariskan melalui sosialisasi. Proses ini diciptakan melalui kebudayaan, bukan oleh naluri. Sementara Watzlawick menyatakan bahwa tidak

ada realitas absolut, yang ada adalah realitas subjektif. Seluruh pengalaman hidup manusia itu subjektif dalam suatu konteks (Bateson, 1972: 47). Dengan demikian, teori konflik dan interaksionisme simbolik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

D. SIMPULAN

Representasi wanita dalam panggung politik Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi terus mengalami peningkatan signifikan, meskipun secara kuantitatif angkanya masih terbilang rendah. Dominasi kaum pria atas wanita dalam panggung politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari rekam jejak sejarah, ideologi, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan nasional. Adanya dominasi pria atas wanita, termasuk pada wilayah politik praktis berakibat pada tidak terakomodasinya kepentingan kaum wanita dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Diskriminasi kaum wanita pada berbagai bidang kehidupan hingga kini masih dapat dijumpai dengan mudah.

Berbagai produk perundangan yang pro-wanita di Indonesia pada dasarnya merupakan langkah awal yang cukup baik, meskipun di masa mendatang harus tetap diperjuangkan. Keberimbangan Caleg pria dan wanita pada Pemilu Legislatif merupakan tuntutan zaman yang tidak bisa terhindarkan. Kebijakan politik itu tentu harus dibarengi dengan pendidikan politik yang memberdayakan wanita. Dominasi kaum pria pada wilayah publik harus segera digeser menuju titik keberimbangan, atau mengedepankan aspek proporsionalitas. Kesadaran politik kaum wanita untuk menaikkan derajat politiknya menjadi dialektika sosial dan komunikasi politik humanis yang seharusnya dibangun oleh seluruh elemen bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, H. (2009). Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender. *Proceeding International Seminar of Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana, PSW & Sekolah Pascasarjana UGM.
- Anonim. (2013, May 7). *Koran Tempo*.
- Anonim. (2013, March 18). *Suara Merdeka*.
- Bateson, G. (1972). *Steps to an Ecology of Mind*. New York: Ballantine.
- Casti, J. L. (1989). *Paradigm Lost*. New York: Avon Books.
- Djawanai, S. (2009). Telaah Bahasa, Telaah Manusia. *Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Linguistik*. Yogyakarta: Fak. Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Heiner, R. (2006). *Social Problems: An Introduction to Critical Constructionism* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
- Junaidi, A. (2010). *Transformasi Identitas dan Pola Komunikasi Para Pelarian Politik di Mancanegara: Studi Interaksi Simbolik terhadap Transformasi Identitas dan Komunikasi Para Pelarian Politik Tragedi 1965 di Negara Swedia, Jerman, Belanda dan Prancis* (Ringkasan Disertasi ed.). Bandung: Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Piaget, J. (1955). *The Origins of Intelligence in Children*. New York: Norton.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. (Alimandan, Trans.) Jakarta: Kencana.
- Suara Merdeka, 18 Maret 2013
- Sukidin, B. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Supadiyanto. (2013, Januari 15). Artis Vs Artis, Siapa Menang? *Harian Umum Pelita*.
- Supadiyanto. (2013, February 4). Artis, Politikus

& Dunia Berpura-pura. *Jateng Post - Jogjakarta Post*.

Supadiyanto. (2013, June 18). Birokrat dan Kesejahteraan Rakyat. *Suara Karya*.

Supadiyanto. (2013, February 27). Konglomerasi Media. *Koran Jakarta*.

Supadiyanto. (2013, April 1). Matematika Pilgub Jateng 2013. *Barometer*.

Supadiyanto. (2013, February 20). Media Massa dan Kaderisasi Pemimpin. *Barometer*.

Supadiyanto. (2013, January 18). Membongkar Relasi Media, Politik dan Demokrasi. *Koran Jakarta*.

Supadiyanto. (2013, May 27). Mendidik Politik Kaum Hawa. *Koran Jakarta*.

Supadiyanto. (2013, February 11). Parpol, Kekuasaan dan Konflik Kepentingan Bernegara. *Jateng Post - Jogjakarta Post*.

Supadiyanto. (2013, March 21). Pesona Kekuasaan. *Koran Jakarta*.

Supadiyanto. (2013, January 31). Peta Kekuatan 10 Parta. *Pelita*.

Supadiyanto. (2013, January 22). Pilgub Jateng & Politik Hegemoni. *Koran Pagi Wawasan*.

Supadiyanto. (2013, May 24). Pilgub Jateng dan Pertarungan Elite Politik. *Sindo*.

Supadiyanto. (2013, February 9). Politik dan Diskriminasi Gender. *Suara Karya*.

Supadiyanto. (2013, February 27). Politik Transaksional. *Suara Karya*.

Supadiyanto. (2013, February 26). Relasi Media Massa dan Sistem Demokrasi. *Barometer*.